

**ANALISA KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PROVINSI SULAWESI BARAT
(STUDI KASUS PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017-2021)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: AMRUL HAKIM

NIM: 126212051

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISA KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH PADA PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**(STUDI KASUS PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017-2021)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: AMRUL HAKIM

NIM: 126212051

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

2022

**ANALISA KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PROVINSI SULAWESI BARAT
(STUDI KASUS PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017-2021)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

AmrulHakim

126212051

Disetujui Oleh:

Pembimbing

SusantoSalim,SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA.,CPMA.

ABSTRAK

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, analisa atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah Pada tahun 2020 BPK melakukan reviu terkait dengan kemandirian fiskal pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, hasilnya terdapat 10 provinsi dengan keuangan daerah masuk kategori belum mandiri dan masih bergantung pada transfer dari pusat, salah satu provinsi tersebut adalah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan Analisa lebih lanjut untuk masing-masing pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Barat dengan perkembangan kemandirian fiskal 5 Tahun Anggaran terakhir. Pengukuran Indeks Kemandirian Daerah pada penelitian ini menggunakan Formula Hunter yang telah disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia

Kata Kunci: Otonomi Daerah; Indeks Kemandirian Fiskal; PAD;

ABSTRACT

Fiscal independence is the main indicator in measuring the ability of regional governments to finance their own regional government activities, without depending on outside assistance, including from the central government. Regional fiscal independence can be determined by calculating the ratio between regional original income to total income or the ratio of transfer income to total income. Therefore, an analysis of regional fiscal independence is deemed necessary so that regional fiscal independence can be mapped and the condition of each region's fiscal independence is known. regional finance is not yet independent and still depends on transfers from the center, one of these provinces is the Province of West Sulawesi. Based on this, the authors will conduct further analysis for each local government in West Sulawesi province with the development of fiscal independence in the last 5 Fiscal Years. The measurement of the Regional Independence Index in this study uses the Hunter Formula which has been adapted to the structure of the APBD in Indonesia

Keywords: Regional autonomy; Fiscal Independence Index; PAD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, terkhusus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Akuntan pada Program Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.

Selama proses penulisan tugas akhir ini, penulis tentunya mendapatkan banyak dukungan dan doa dari keluarga, kerabat, teman, serta para dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada:

1. Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Kepala Program Studi PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan hingga menyusun tugas akhir ini.
2. Susanto Salim SE., M.M., Ak., CPA, CPMA, CA, ACPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, serta dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen, staf dan karyawan di PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengetahuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Seperti kata pepatah, *Tak Ada Gading yang Tak Retak*, demikian juga dengan tugas akhir ini yang tidak terlepas dari kekurangan. Akhir kata penulis memohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini.

Mamuju, 20 Desember 2022

Amrul Hakim

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1. Otonomi Daerah	3
2.2. Kemandirian Fiskal	5
2.3. PengertianTren	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	8
3.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat.....	8
3.2. Metode Penelitian.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1. Perhitungan Data	11
4.2. Analisis hasil perhitungan	12
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah	7
Tabel 3.1 Daftar Opini LKPD di Sulawesi Barat Lima Tahun Anggaran Terakhir	9
Tabel 3.2 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal	10
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Nilai IKF TA 2017-2021 untuk Pemerintah Daerah - Provinsi Sulawesi Barat	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Trend Nilai IKF Pemprov Sulawesi Barat TA 2017-2021	13
Gambar 4.2 Grafik Trend Nilai IKF Pemerintah Kabupaten Mamuju.	14
Gambar 4.3 Grafik perolehan PAD Pemkab Mamuju TA 2017-2021.....	14
Gambar 4.4 Grafik Trend Nilai IKF Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	15
Gambar 4.5 Grafik perolehan PAD Pemkab Polewali Mandar TA 2017-2021.....	15
Gambar 4.6 Grafik Trend Nilai IKF Pemerintah Kabupaten Majene.....	16
Gambar 4.7 Grafik perolehan PAD Pemkab Majene TA 2017-2021	17
Gambar 4.8 Grafik Trend Nilai IKF Pemerintah Kabupaten Mamasa	17
Gambar 4.9 Grafik perolehan PAD Pemkab Mamasa TA 2017-2021.....	18
Gambar 4.10 Grafik Trend Nilai IKF Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.....	19
Gambar 4.11 Grafik perolehan PAD Pemkab Pasangkayu TA 2017-2021	19
Gambar 4.12 Grafik Trend Nilai IKF Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	20
Gambar 4.13 Grafik perolehan PAD Pemkab Mamuju Tengah	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 1999, Pemerintah Daerah di Indonesia memasuki fase baru dalam sistem pemerintahan. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat (Fathah, 2017). Sebagai daerah yang otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengelola semua potensi daerah yang meliputi sumber daya alam, manusia dan keuangan secara optimal. Potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah tersebut harus sejalan dengan semangat terwujudnya good governance, yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang bertanggungjawab dan solid serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politik dengan mempraktikkan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha yang seluas luasnya (Hadi, 2017).

Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Untuk menjalankan otonomi

daerah diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu didukung dengan kemandirian fiskal daerah. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, maka disahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada tahun ini diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut diharapkan Pemerintah daerah dapat memaksimalkan segala potensi pendapatan yang bisa diperoleh untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, serta kemandirian fiskal daerah.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, analisa atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020).

Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Pembentukan provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi ke-33, merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2004. Pada tahun 2020 BPK melakukan reviu terkait dengan kemandirian fiskal pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, hasilnya terdapat 10 provinsi dengan keuangan daerah masuk kategori belum mandiri dan masih bergantung pada transfer dari pusat, salah satu provinsi tersebut adalah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan Analisa lebih lanjut untuk masing-masing pemerintah daerah di provinsi terkait dengan perkembangan kemandirian fiskal 5 Tahun Anggaran terakhir.

1.2. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Barat, bertujuan untuk melakukan analisis serta evaluasi kemandirian fiskal pemerintah daerah pada provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). *Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- BPK. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK.

- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK.

- BPK. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021*. Mamuju: BPK.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, Vol.8, No. 1, Hal. 33-48.
- Hadi, W. (2017). Pengaruh Earning Performance dan Proporsi PAD LKPD 2015 Terhadap Kemandirian Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 3, Nomor 1.

- Halim, A. (2001). *Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hunter, J. S. H. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*. Australian National University Press for Research on Federal Fiscal Relations.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Maryati. (2010). *Strategi Pembelajaran Inkuiri*. Retrieved from staff.uny.ac.id: http://staffnew.uny.ac.id/staff/132258076_7strategi-pembelajaran-inkuiripdf
- Pambudi, Septian Bagus. 2008. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat* [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Taufick, A. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.